

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan arahan bagi manusia agar tumbuh sesuai dengan apa yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menjadi jati diri yang hakiki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kemudian muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, menyatakan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Salah satu standar tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sebagai upaya yang berkelanjutan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA). Peraturan menteri tersebut menjelaskan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.

Pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat sekolah yang berkualitas salah satunya mempunyai kelengkapan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar tersebut. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran.

Barnawi & M. Arifin (2014), menjelaskan pengertian sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini, pengertian prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan.

Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali masalah dapat muncul.

Masalah-masalah itu dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah. Dengan sarana dan prasarana yang mencukupi diharapkan outputnya akan mencapai tujuan awal dari sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan memang memerlukan fasilitas atau peralatan, akan tetapi semua peralatan atau fasilitas harus diadakan sesuai dengan kebutuhan. Jika semua peralatan dan fasilitas sudah ada harus dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan benar. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini menjadi tanggung jawab sekolah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap hasil prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu dari delapan Standar Pendidikan Nasional sebagai penunjang untuk menjamin lancarnya penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Sarana dan prasarana menjadi penting karena sarana dan prasarana merupakan hal yang mendasar dalam menunjang kegiatan

belajar mengajar, artinya proses pendidikan tanpa sarana dan prasarana pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab VII Pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menyebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen sarana dan prasarana pendidikan karena sarana dan prasarana pendidikan termasuk aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana dan prasarana pendidikan tetap harus terus menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk memenuhi standar karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Sarana dan prasarana yang lengkap tidak cukup untuk mendukung proses belajarmengajar tanpa adanya sebuah manajemen yang baik. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan faktor penting dalam memajukan suatu lembaga pendidikan karena manajemen sarana dan prasarana baik dapat menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi pendidik maupun untuk peserta didik. Kesulitan mengelola sarana dan prasarana pendidikan akan menjadi semakin besar jika sistem dan prosedur pengelolaannya tidak jelas, termasuk jika kemauan dan kemampuan pengelolanya tidak ada dan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Akibat kurangnya kepedulian warga sekolah terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dewasa ini banyak ditemukan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah tidak digunakan secara optimal.

Agar tercapainya tujuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah harus bisa mencari solusi untuk mengadakan, merawat, dan meremajakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Koordinasi dan membentuk Waka Sarana Prasana yang baik dan tepat, serta menanamkan pemahaman terhadap bawahannya dan siswanya untuk selalu menjaga dan merawat sarana prasarana pendidikan akan membantu dalam proses manajemen sarana prasarana. Seperti kita tahu bahwa salah satu tugas pemimpin ataupun dalam hal ini kepala sekolah adalah mengelola administrasi, yang didalamnya menyangkut pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Prosedur Pelaporan Persediaan pada Aplikasi dalam sarana dan prasarana Sistem Informasi Persediaan Daerah di BPPKAD Kota Probolinggo" Persediaan merupakan salah satu jenis asset yang tergolong dalam asset lancar dan asset jangka pendek. Persediaan di lingkup pemerintahan merupakan aktivitas asset lancar milik pemerintah yang disajikan pada laporan neraca yang di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 (Perwali) Tentang Implementasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan, menyatakan bahwa persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PMK 219/PMK.05/2013). Akuntansi Persediaan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan. Setiap entitas maupun instansi pasti memiliki persediaan, termasuk instansi pemerintahan. Persediaan selain penting untuk mendukung kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) suatu instansi, seringkali juga memiliki nilai yang cukup signifikan atau material dalam total asetnya. Oleh sebab itu, kesalahan saji atas nilai persediaan dapat menentukan kewajaran dalam laporan keuangannya, dan kesalahan saji tersebut dapat mempengaruhi opini auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, tahapan dalam pelaporan persediaan ini sangat perlu untuk

diperhatikan, mulai dari perencanaan persediaan hingga rekonsiliasi persediaan. Menginput persediaan secara manual memiliki resiko kesalahan yang cukup tinggi. Selain mudah terjadinya kesalahan human, pencatatan secara manual juga menghabiskan banyak waktu.

Dunia pendidikan dalam hal ini lembaga atau sekolah juga tidak bisa melepaskan diri dari dunia globalisasi, teknologi dan informasi. Sekolah juga dituntut sebagai *leading sector* dalam memajukan sistem pendidikannya. Sistem pendidikan mulai dari media pembelajaran, absensi tenaga pendidik, kependidikan dan siswanya, sistem penilaian, sistem keuangan, sistem stok sarana dan prasarana, tetap membutuhkan kehadiran sebuah aplikasi untuk mempermudah pekerjaan. Software atau aplikasi adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau intruksi yang dengan melalui software (perangkat lunak) komputer dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol hardware (perangkat keras). Software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh programmer yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompilasi sehingga menjadi sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin hardware. Semua itu dilakukan untuk manajemen pengaturan sarana dan prasarana.

SMP Negeri 6 Probolinggo sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, juga menerapkan manajemen

dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, baik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jakarta, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, dari Inspektorat Kota Probolinggo, maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan SMP Negeri 6 Probolinggo.. manajemen yang dimaksud ini adalah pencatatan persediaan barang yang digunakan untuk mencatat, mengelola dan membuat laporan data persediaan barang secara relevan, efektif dan praktis. Manajemen ini juga dapat memudahkan staff dalam mengelola pencatatan persediaan barang. Sehingga selain pencatatannya lebih mudah, stok barang juga lebih aman. Dengan manajemen pencatatan persediaan barang ini, semua pendataan barang yang masuk dan keluar lebih teratur.

Kelebihan manajemen ini adalah lebih mengefektifkan waktu dalam melakukan pekerjaan serta dapat menumbuhkan jiwa disiplin bagi pegawai agar tidak mengentengkan pelaporan karena dengan disiplin dalam melakukan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja dan prestasi pegawai maupun lembaga sekolah tersebut. Meskipun demikian, kekurangan tetap ada masih harus diperhatikan dari segala segi agar tidak terjadi kesalahan dalam identifikasi. Tetapi kejadian tersebut bisa diantisipasi, melihat bahwa sistem ini sudah lebih baik dari sistem sebelumnya.

Berdasarkan deskripsi dan narasi di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut, maka dari itu judul skripsi yang penulis ambil adalah “ Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui tentang :

1. Bagaimana implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat.

- b. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian lanjut terkait dengan implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo.

2. Secara Praktis

- a. *Bagi Mahasiswa*, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai manajemen sarana prasarana pada sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan.
- b. *Bagi Peneliti*, yang juga sekaligus sebagai pelaksana manajemen dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien.
- c. *Bagi Pemerintah*, berkaitan dengan implelementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sebuah aplikasi, dan mempermudah temuan-temuan lebih awal sebelum melaksanakan monitoring ke lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami skripsi ini, maka skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka dasar teoritik, dan kerangka pemikiran sebagai jawaban sementara dari penelitian ini tentang implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian tentang implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Dinas terkait yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

5. Bab V Penutup

Bab V kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait implementasi manajemen sarana dan prasarana Di SMP Negeri 6 Probolinggo. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran

dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subyek penelitian.